

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi mewajibkan pemerintah daerah mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya selain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara tiap-tiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah serta membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana dalam hal ini merupakan tanggung jawab Kepala Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya akan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan Negara, pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam hal pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, Dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK akan mengeluarkan opini atau pendapat yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Berikut adalah tabel perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia Tahun 2008-2013 diuraikan dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD
Tahun 2008s.d. 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS 1) Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas masih banyak LKPD yang belum mendapatkan opini WTP, sampai dengan tahun 2012 hanya ada 113 daerah kabupaten yang memperoleh opini WTP, selebihnya 267 daerah wajar dengan pengecualian, 4 daerah berstatus wajar dan 31 daerah berstatus tidak memberikan pendapat. Telah tersedia aturan- aturan diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, namun masih 27% LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Berikut adalah tabel opini

LKPD Kabupaten/Kota di daerah provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012 dirinci dalam table 1.2:

Tabel 1.2
Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 s.d. 2012

No	Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
1	Prov. Jawa Timur	WDP	WDP	WTP	WTP DPP	WTP
2	Kab. Bangkalan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Banyuwangi	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
4	Kab. Blitar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Bojonegoro	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Bondowoso	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP
7	Kab. Gresik	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab. Jember	TW	WDP	WDP	WDP	WTP
9	Kab. Jombang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kab. Kediri	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
11	Kab. Lamongan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kab. Lumajang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kab. Madiun	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
14	Kab. Magetan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	Kab. Malang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kab. Mojokerto	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
17	Kab. Nganjuk	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
18	Kab. Ngawi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
19	Kab. Pacitan	WDP	WDP	WTP	WTP DPP	WDP
20	Kab. Pamekasan	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WDP
21	Kab. Pasuruan	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
22	Kab. Ponorogo	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
23	Kab. Probolinggo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
24	Kab. Sampang	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
25	Kab. Sidoarjo	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
26	Kab. Situbondo	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
27	Kab. Sumenep	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
28	Kab. Trenggalek	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
29	Kab. Tuban	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WDP
30	Kab. Tulungagung	WDP	WDP	WTP	WTP DPP	WTP
31	Kota Batu	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
32	Kota Blitar	WDP	WDP	WTP	WTP DPP	WTP
33	Kota Kediri	TW	WDP	WDP	WDP	WDP

34	Kota Madiun	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
35	Kota Malang	WDP	WDP	WDP	WTP DP	WTP
36	Kota Mojokerto	WDP	WDP	WTP	WTP DP	WTP
37	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
38	Kota Probolinggo	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP
39	Kota Surabaya	TMP	TW	WDP	WDP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS 1) Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2010, dari 39 pemerintah daerah Jawa Timur (1 pemerintah provinsi, dan 38 pemerintah kabupaten/kota), dan sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bangkalan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian dalam sebuah pertanyaan yaitu “Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan dari penulisan ini adalah “Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah daerah, dapat mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan serta bisa terus meningkatkan prestasi yang telah dicapai.
- 2) Bagi perguruan tinggi, untuk dijadikan bahan referensi dan dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan.
- 3) Bagi Mahasiswa, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan waktu Penelitian

Nama Instansi/Perusahaan : Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.35 Bangkalan
Jawa Timur Indonesia

Telepon : 031-3098579

E-mail : bpkad.bangkalan@yahoo.com

Website : <http://bpkad.bangkalankab.go.id>

Pelaksanaan : 13 Januari 2014 – 14 Februari 2014